

**DUALISME PENAFSIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA BATAS USIA PENCALONAN
KEPALA DAERAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Aulia Akbar Navis
NIM. 02040423016

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Akbar Navis

NIM : 02040423016

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Dualisme Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Dan
Mahkamah Agung Dalam Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala
Daerah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 02 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Aulia Akbar Navis
02040423016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Aulia Akbar Navis

NIM : 02040423016

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

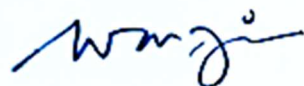
Judul : Dualisme Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah

Tesis yang telah ditulis ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian

Surabaya, 02 Desember 2024

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Prof. Dr. Sri Warjiyati, M.H
NIP. 196808262005012001



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Aulia Akbar Navis, NIM.02040423016 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Strata Dua dalam Prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji

Prof. Dr. Sri Warjivati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Sekretaris Penguji

Dr. H. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji 1

Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji 2

Dr. Achmad Fageh, M.Hl.
NIP. 197306032005011004

Surabaya, 20 Desember 2024
Mengesahkan,
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,


H. Mufata'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Akbar Navis

NIM : 02040423016

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Magister Hukum Tata Negara

E-mail address : auliaakbarnavis@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

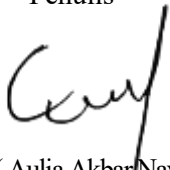
**DUALISME PENAFSIRAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA
BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2026

Penulis


(Aulia Akbar Navis)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	22
1. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah.....	22
2. Dasar Hukum dan Sistem Pemilihan di Indonesia.....	24
B. Teori Kewenangan.....	28
C. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	33
D. Teori Keberlakuan Hukum.....	37
BAB III.....	44
PERTIMBANGAN HUKUM (<i>RATIO DECIDENDI</i>) HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENAFSIRKAN PERKARA BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH.....	44

A. Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsirkan Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah	44
B. Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Hakim Mahkamah Agung Dalam Menafsirkan Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah.....	59
BAB IV	71
IMPLIKASI HUKUM AKIBAT ADANYA DUALISME PENAFSIRAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PILKADA 2024	71
A. Implikasi Akibat Dualisme Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung.....	71
1. Perbedaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung .	74
2. Ketidakjelasan dalam Implementasi Hukum oleh Komisi Pemilihan Umum	79
3. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan	82
4. Inkonsistensi antara Norma Hukum yang Lebih Tinggi dan Lebih Rendah	84
BAB V	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Dualisme Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dalam Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah”. Tesis ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung dalam Menafsirkan Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah? 2. Bagaimana Implikasi Hukum Akibat Adanya Dualisme Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Keberlangsungan Pilkada 2024?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menerapkan teori Kewenangan, teori pemisahan kekuasaan, dan teori keberlakuan hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Hasil penelitian, *Pertama* Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XXII/2024, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. menambahkan pemaknaan baru akan memosisikan norma *a quo* menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No 23 P/HUM 2024 dirasa belum tepat karena Mahkamah Agung masuk dalam penafsiran *original intent*, kemudian dalam pembacaan aturan secara holistik Pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan serangkaian tahapan yang berarti status calon sudah melekat saat Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon, dan juga Mahkamah Agung tidak boleh mengubah/ menambah/ memperbaiki norma yang diuji, Mahkamah Agung hanya cukup menyatakan norma tersebut bertentangan atau tidak. *Kedua*, empat implikasi akibat dualisme putusan 1. Perbedaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. 2. Ketidakjelasan dalam Implementasi Hukum oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan kepala daerah. 3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan karena terdapat putusan yang saling bertolak belakang. 4. Inkonsistensi antara Norma Hukum yang Lebih Tinggi dan Lebih Rendah,

Kata Kunci: Dualisme Putusan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pemilihan Kepala Daerah.

ABSTRACT

This thesis is the result of research with the title "Dualism in the Interpretation of Decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court in Cases of Age Limits for Candidates for Regional Heads". This thesis was written to answer questions outlined in two problem formulations, namely: 1. What are the Legal Considerations (Ratio Decidendi) of Constitutional Court Judges and Supreme Court Judges in Interpreting Age Limit Cases for Regional Head Candidates? 2. What are the legal implications resulting from the dualism in the interpretation of judges at the Constitutional Court and the Supreme Court in the case of the age limit for nominations for regional heads on the continuity of the 2024 regional elections?

This research uses a type of normative legal research by applying authority theory, separation of powers theory, and legal enforcement theory using statutory, case, and conceptual approaches.

The results of the research, Firstly, the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024, Article 7 paragraph (2) letter e Law 10/2016 is a clear, clear norm, the requirements in question must be fulfilled in the nomination process which culminates in the determination of the candidate . adding a new meaning will position the a quo norm to be different (an anomaly) among all norms within the scope of requirements for regional head candidates and deputy regional head candidates. The Supreme Court Judge's considerations No. 23 P/HUM 2024 were deemed inappropriate because the Supreme Court entered into the interpretation of the original intent, then in a holistic reading of the rules. Regional head elections are carried out in a series of stages, which means that the candidate's status is already attached when the General Election Commission determines the candidate pairs, and Also, the Supreme Court may not change/add/improve the norms being tested, the Supreme Court only needs to state whether the norms conflict or not. Second, four implications resulting from the dualism of decisions 1. Differences in the Authority of the Constitutional Court and the Supreme Court. 2. Unclearness in the Implementation of the Law by the General Election Commission as the organizer of regional head elections. 3. Declining public trust in the justice system because there are contradictory decisions. 4. Inconsistency between Higher and Lower Legal Norms.

Keywords: Dualism in Decisions, Constitutional Court, Supreme Court, Regional Head Election.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpersensi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arsil, Fitra, *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pusat Study Demokrasi dan HAM PusDeHAM, 2006.
- Asrun, Muhammad, Dkk, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik dalam Pemilu*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Bachtiar, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Carias, Brewer dalam Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Djuyandi, Yusa, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2008.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial review Di Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Huda, Ni'matul, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan-Jilid 1)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- J. Prihatmoko, Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1984.
- Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Jakarta: CV Mandar Maju, 2010.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia, 2016.
- Khaleed, Badriyah, *Mekanisme Judicial Review*, Jakarta: Mediapressindo, 2018.
- Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015.
- Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung: Bandar lampung, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Rauta, Uumbu, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit: Genta Publishing, 2016.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Safi, *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial review di Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Safa'at, M. A., Ekatjahjana, W., Fatmawati., Saifuddin., & Amsari, F. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- Schwartz, Herman, *The Struggle For Constitutional Justice in Post Communist Europe*, 2002.

Sekretariat jenderal MPR R.I., *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR R.I. 2003.

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Suharizal, *PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 1998.

Suny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1982.

Syamsuddin, Aziz, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati.

Jurnal

- Agus Pramusinto, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2, 2004, 240.
- Arrasuli, Beni Kharisma, Yumni Nadhilah, “Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan”, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Arthur Parulian Gultom, Kharisma, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengujian Keabsahan Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan di Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 103k/Tun/2010), 2013.
- Cassia Spohn, How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment, California: Sage Publications Inc.
- Febriansyah Ramadhan, Dkk, Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/Hum/2018), Jurnal Rechtvinding, Volume 11 Nomor 1, 2022.
- Hanafi, Ridho Imawan. Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. Jurnal Penelitian Politik. Vol.11(2) 2014, 2-3.
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, St. Paul: West Publishing. Co, 1991.
- Kantaprawira, Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.
- Khumaiddi, “Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi”, Jurnal Kebangsaan, I (September, 2012), 20-21.
- Lailam, T. Penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi Bahasa Indonesia: 15(1), 2018, 206–230.
- M.Hadjon, Philipus, Tentang Wewenang, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, 1997.
- Maggalatung, Salman, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Sistem Pemilihan Umum*.
- Marihot Janpieter Hutajulu, Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim, Jurnal Refleksi Hukum, vol. 9, no. 1, 2015. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>
- Muhammad Alim, Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, Vol 17 No.1 Januari, 2010.

- Ryan Chandra Sukma, Rosalia Dika Agustanti, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 5 No. 1 2023.
- Rishan, Idul, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1811>
- Rokilah, Sulasno, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No 2, Desember 2021. 179-190
- Situmorang, Doby Agustinus, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MK No. 30/Puu-Xvi/2018 dan Putusan, MA No. 65 P/Hum/2018 Terkait Judicial review Atas Syarat Pencalonan Anggota DPD*.
- Sodikin. Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1(1), 2014, 102.
- Soeroso, Fajar Laksono, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No 1, Maret 2014.
- Suhaimi “Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2 (2018): 208. <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf>.
- Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, I (Oktober 2016), 118.
- Zaini, Zulfi Diane, “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum” *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2011): 130. <https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf>
- Zuhrah, *Urgensi Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret 2023.

Website

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn--2-kejanggalan-putusan-ma-tentang-syarat-usia-kepala-daerah-lt666272e81d4e6>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar--putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah-sangat-tidak-wajar-lt6661addbdd0ab>
- <https://www.law-justice.co/artikel/173025/mahfud-putusan-mk-soal-syarat-pencalonan-berlaku-sejak-palu-diketok/>